

■ Kasus Salim

SEMARANG- Polda Jateng meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kembali mengaudit kasus dugaan korupsi penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) APBD Rembang 2006-2007.

Kapolda Jateng Irijen Pol Edward Aritonang mengatakan, audit tersebut digunakan untuk memastikan jumlah kerugian keuangan negara. "Kita sudah ekspose di BPK di Jakarta. Di situ kita juga mohon BPK mengaudit lagi kasus tersebut," katanya, Jumat (27/8) di Mapolda Jateng.

Kapolda mengatakan, sebelumnya penyertaan modal tersebut memang sudah diaudit oleh BPK. Namun audit hanya fokus pada pos proyek pengadaan tanah untuk proyek Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan kerugian negara Rp 5,2 miliar. Padahal, dana APBD yang dikucurkan senilai Rp 35 miliar tersebut digunakan untuk beberapa proyek lain.

Kapolda mengatakan, sebelumnya penyertaan modal tersebut memang sudah diaudit oleh BPK. Namun audit hanya fokus pada pos proyek pengadaan tanah untuk proyek Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan kerugian negara Rp 5,2 miliar. Padahal, dana APBD yang dikucurkan senilai Rp 35 miliar tersebut digunakan untuk beberapa proyek lain.

Kapolda mengatakan pihaknya berkomitmen dalam menangani kasus korupsi di Jateng. Meskipun dalam kasus ini, Bupati Rembang, Moch Salim dinyatakan sebagai tersangka, namun ia menginstruksikan penyidik untuk tidak bersikap lembek.

"Kita komitmen untuk menangani kasus ini. Jika memang dalam penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup maka kita akan tegas menuntaskannya," kata Kapolda.

Kasus ini berawal ketika Pemkab Rembang mengucurkan dana penyertaan modal usaha pada PT RBSJ senilai Rp 35 miliar. Dana dikeluarkan dalam dua tahap yakni APBD 2006 Rp 25 miliar dan APBD 2007, Rp 10 miliar. (ton,H21-53)